

UPAYA MEDIASI TIONGKOK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL AFGHANISTAN TAHUN 2016-2021

Dhy'van Yusuf Madjid^{1*)}, Uni W. Sagena²⁾

¹⁾Universitas Mulawarman, Samarinda

Email: Ivanyusuf170800@gmail.com

ABSTRACT

This research examines China's mediation efforts in resolving Afghanistan's internal conflict between 2016 and 2021, emphasizing the strategic national interests driving its involvement. Employing a qualitative explanatory method, the study utilizes secondary data gathered from scholarly literature, official reports, and policy documents. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, involving data collection, reduction, display, and conclusion.

The findings demonstrate that China's mediation is primarily motivated by its economic and security interests, notably its intent to safeguard investments and curb the spread of extremism into Xinjiang. Additionally, China seeks to promote regional stability to support the broader objectives of its Belt and Road Initiative. By engaging in bilateral dialogues and multilateral platforms—including collaboration with both the Afghan government and the Taliban—China has established itself as a pragmatic and influential actor in Central Asia's peace process. This study contributes to a deeper understanding of China's foreign policy approach, regional engagement strategies, and conflict resolution diplomacy.

Keywords: (Belt and Road Initiative, Conflict Resolution, Diplomacy, National Interest)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya mediasi Tiongkok dalam menyelesaikan konflik internal Afghanistan selama periode 2016 hingga 2021, dengan menyoroti kepentingan nasional strategis yang mendorong keterlibatannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksplanatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari literatur akademik, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok didorong oleh kepentingan ekonomi dan keamanan, khususnya untuk melindungi investasi dan mencegah penyebaran ekstremisme ke wilayah Xinjiang. Selain itu, Tiongkok berupaya menciptakan stabilitas kawasan guna mendukung *Belt and Road Initiative* (BRI). Melalui diplomasi bilateral dan keterlibatan multilateral—baik dengan pemerintah Afghanistan maupun Taliban—Tiongkok memposisikan diri sebagai aktor strategis dan pragmatis dalam proses perdamaian Asia Tengah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kebijakan luar negeri Tiongkok, strategi keterlibatan kawasan, dan praktik resolusi konflik global.

Kata kunci: (Diplomasi, Inisiatif Sabuk dan Jalan, Kepentingan Nasional, Resolusi Konflik)

PENDAHULUAN

Afghanistan adalah suatu negara yang terletak di Asia Tengah dan Asia Selatan. Afghanistan selalu mengalami pergolakan, sehingga terjadinya ketidakstabilan di Afghanistan, baik dari politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Pada abad ke-16 hingga ke-21 banyak terjadi perang hingga setelahnya terjadi perebutan kekuasaan. Dimulai dari perang antara suku di Afghanistan sampai perang dengan negara lain yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris pada masa perang dunia kedua (Katzman, 2010).

Afghanistan mempunyai wilayah yang sangat geografis karena terletak di antara tiga puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Korakorum, Hindu Kush dan Himalaya. Hindu Kush membagi Afghanistan menjadi tiga wilayah geografis yang terpisah, yaitu Dataran Utara, Dataran Tinggi Sentral, dan Dataran Tinggi Barat Daya. Dataran Tinggi Sentral sendiri merupakan bagian dari pegunungan Himalaya dan juga daerah lembah. Lembah di Dataran Tinggi Sentral berada di ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut, yang mana wilayah tersebut menjadi tempat strategis yang besar sebagai medan perang (Hadibroto et al., 2002). Meskipun demikian, Afghanistan masih memiliki kekayaan alam dan potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, seperti tembaga, perak, emas, batu bara, minyak bumi dan timah yang cukup banyak. Selain itu, Afghanistan merupakan negara dengan sumber pendapatan dari produksi opium dengan kontribusi mencapai 85% dari total produksi opium secara global (Pambudi, 2022).

Kurangnya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam di Afghanistan, disebabkan oleh banyaknya konflik yang terjadi secara terus-menerus sehingga membuat Afghanistan terus fokus pada masalah keamanan negara. Misalnya, konflik dengan kelompok Taliban, yakni salah satu dari Gerakan Mujahidin Islam di Afghanistan yang menguasai pemerintahan Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001. Mereka juga merupakan kelompok perlawanan Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah Afghanistan modern. Ketika kelompok Taliban pertama kali muncul di Afghanistan pada tahun 1994, pengamat-pengamat politik Barat awalnya tidak menganggap mereka sebagai

kelompok yang signifikan dalam konteks politik dunia Islam. Namun, penelitian mengenai Taliban mulai muncul pada akhir 1990an dan perhatian dunia terhadap mereka semakin meningkat setelah peristiwa 11 September 2001 (Al-Ghiffari, 2013).

Taliban telah berhasil mengendalikan empat dari lima kota utama di Afghanistan, termasuk Kabul, Kandahar, Herat, dan Jalalabad. Satu-satunya kota utama yang masih tidak dikuasai oleh Taliban adalah Mazae Syarif di wilayah Utara Afghanistan. Dengan demikian, sulit untuk membantah bahwa Afghanistan telah jatuh ke tangan Taliban (Maley, 1999). Taliban telah mengendalikan sekitar 90% dari wilayah Afghanistan serta mengambil alih pemerintahan di sebagian besar wilayah tersebut (Hadibroto et al., 2002).

Afghanistan dan Tiongkok memiliki hubungan yang harmonis, hal tersebut di dasari oleh beberapa faktor, yaitu Tiongkok tidak pernah terkait dalam urusan politik dalam negeri Afghanistan maupun konflik lainnya seperti batas wilayah antara kedua negara (Hong, 2013). Hubungan baik tersebut juga dapat dilihat saat Presiden Karzai mengunjungi Tiongkok pada tahun 2010 dan kedua negara sepakat bahwa mereka akan menjalin hubungan baik sebagai negara tetangga yang berlandaskan pada kepercayaan satu sama lain (Ng, 2010).

Tiongkok tidak hanya membangun hubungan baik dengan Afghanistan tetapi juga dengan Taliban (Small, 2013). Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan petinggi Taliban ke Tiongkok pada tahun 2014 (Tiezzi, 2015). Kunjungan tersebut merupakan momentum yang dinilai penting bagi hubungan antara Taliban dan Tiongkok meskipun tidak membahas tentang negosiasi perdamaian. Tiongkok bersama Pakistan dan Rusia telah menyetujui untuk menghapus beberapa sanksi dari banyak tokoh sebagai upaya untuk memperkuat proses perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan pada akhir tahun 2016 (Khalil, 2017).

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk dapat mencapai kesepakatan bersama agar menyelesaikan konflik antara Afghanistan dan Taliban (Tikonova, 2017). Dalam upaya perdamaian Afghanistan dan Taliban, Tiongkok Bersama Pakistan, Amerika Serikat dan Afghanistan membentuk *Quadrilateral*

Coordination Group sebagai wadah negosiasi antara Afghanistan dan Taliban (Chiu & Ferrie, 2016).

Quadrilateral Coordination Group (QCG) merupakan forum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan berbagai negara di pertemuan *The Heart of Asia Conference* di Islamabad pada 9 september 2015. Negara Rusia, Pakistan, Amerika Serikat dan Afghanistan berkomitmen untuk memfasilitasi rekonsiliasi proses perdamaian antara Afghanistan dan Taliban agar tercapainya perdamaian dan kestabilisasian di Afghanistan dan wilayah sekitarnya (Desk, 2016). Selain itu Tiongkok juga ikut serta dalam memberikan bantuan untuk proses rekonsiliasi Afghanistan dengan Taliban melalui *Shanghai Cooperation Group* yang terdiri dari beberapa negara yaitu Tiongkok, Rusia, Tajikistan, Kirghiztan, dan Uzbekistan (Raiszadal, 2015).

Selama bertahun-tahun konflik antara Afghanistan dan Taliban untuk mencapai perdamaian sangat sulit sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi negara tetangganya yaitu Tiongkok. Terciptanya konflik ini akan berdampak pada tersebarnya berbagai pengaruh Taliban ke Tiongkok (Ahrari, 2000). Dalam pandangan Tiongkok kelompok teroris *East Turkistan Islamic Movement (ETIM)* dan kelompok separatis di Xinjiang merupakan suatu bentuk ancaman serius bagi keseimbangan Tiongkok di Provinsi Xinjiang. Tiongkok sendiri memiliki banyak investasi di Afghanistan dengan nilai investasi tambang tembaga di Mes Aynak terbesar yaitu mencapai 3,4 miliar USD (Gartenstein-Ross et al., 2014). Namun stabilitas keamanan di Afghanistan akibat konflik dengan Taliban membuat *China Metallurgical Group (CMG)* sejauh ini tidak lagi menambang satu ons pun dari tambang tembaga di Mes Aynak (Hasrat & Nazimi, 2016).

Adanya perdamaian antara Afghanistan dan Taliban akan menguntungkan negara-negara berkonflik termasuk Tiongkok. Stabilitas di Afghanistan dapat memberikan situasi yang baik bagi kepentingan ekonomi maupun keamanan bagi Tiongkok sebagai negara tetangga Afghanistan. Terlebih lagi sumber daya alam yang dimiliki Afghanistan sangat besar apabila dinilai yaitu sebesar 100 miliar USD yang menjadi daya tarik banyak negara untuk berinvestasi (Piven, 2015).

Sejak dikuasainya pemerintahan Afghanistan oleh Taliban pada tahun 2021 muncul signifikansi keamanan dan politik tidak hanya bagi internal Afghanistan tetapi juga bagi geopolitik global (Anugerah & Purba, 2021). Dan Tiongkok merupakan negara yang paling intens dalam upaya perdamaian, ketika Taliban berhasil menguasai pemerintahan Afghanistan, Tiongkok menjadi yang pertama dalam yang menyatakan dukungannya kepada Taliban sebagai pemerintah Afghanistan secara *de facto* (M. Reza Syariffudin Zaki, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, Penelitian eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan dasar pertanyaan “bagaimana”, dengan menyampaikan fakta-fakta yang diperoleh dari data. Penelitian eksplanatif tidak hanya menjelaskan mengenai fenomena, tetapi juga menjelaskan apa pengaruhnya (Library, 2020). Peneliti yang membuat hipotesis sebagai kesimpulan sementara di awal harus menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti berusaha menjelaskan mengenai upaya mediasi Tiongkok dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan tahun 2016-2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, penelitian tersebut menggunakan data sekunder yang menjadi referensi dalam penelitian ini melalui media buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan sumber media lainnya yang berkaitan dengan upaya mediasi Tiongkok dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan.

Landasan Teori

Kepentingan Nasional

Dalam menganalisis upaya mediasi Tiongkok dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan tahun 2016-2021, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional Menurut pandangan Neorealisme, kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mencapai kekuasaan, yang mencakup segala hal yang dapat meningkatkan dan menjaga kontrol suatu negara terhadap negara lainnya. Hubungan kekuasaan atau pengendalian

ini bisa dicapai melalui metode yang bersifat paksaan maupun kerjasama. Dengan demikian, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai alat dan tujuan dalam tindakan sebuah negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya dalam konteks politik internasional (Waltz, 1979).

Menurut K.J. Holsti, dalam karyanya yang berpengaruh, *International Politics: A Framework for Analysis*, menawarkan perspektif yang membedakan kepentingan nasional berdasarkan urgensi dan jangka waktu pencapaiannya (Holsti, 1967). Ia berpendapat bahwa tidak semua kepentingan memiliki bobot yang sama bagi para pembuat kebijakan. Dengan menyusunnya dalam sebuah hierarki, kita dapat lebih memahami skala prioritas sebuah negara dan jenis tindakan yang mungkin diambil untuk mencapainya.

1. Kepentingan Inti (*Core Interests*)

Merupakan kepentingan jangka pendek yang bersifat krusial bagi kelangsungan hidup negara. Kegagalan dalam memenuhinya dapat mengancam eksistensi negara. Ini adalah kepentingan yang tidak dapat ditawar (*non-negotiable*) dan negara bersedia menggunakan segala cara, termasuk kekuatan militer, untuk mempertahankannya. Kepentingan inti berfokus pada perlindungan fisik, politik, dan kultural suatu bangsa. Contoh paling jelas dari kepentingan inti adalah mempertahankan integritas teritorial dari invasi asing, melindungi kedaulatan dari upaya dominasi eksternal, dan menjaga keamanan warga negara dari ancaman kekerasan skala besar. Karena sifatnya yang fundamental, ancaman terhadap kepentingan inti biasanya menuntut respons yang cepat dan tegas dari pemerintah (Holsti, 1967).

2. Kepentingan Jangka Menengah (*Middle-Range Interests*)

Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta menaikkan status dan prestise negara dalam sistem internasional. Berbeda dengan kepentingan inti yang bersifat defensif, kepentingan jangka menengah lebih proaktif dan menjadi agenda utama dalam diplomasi sehari-hari. Pencapaian kepentingan ini umumnya dilakukan melalui negosiasi, tawar-menawar, dan kesepakatan dengan negara lain, bukan melalui ancaman kekuatan. Contohnya mencakup upaya untuk mendapatkan akses pasar yang

lebih baik bagi produk ekspor, menarik investasi asing, mengamankan pasokan sumber daya vital, serta meningkatkan pengaruh dan reputasi negara di forum-forum internasional. Kepentingan ini penting, namun sebuah negara mungkin bersedia berkompromi pada satu isu untuk mendapatkan keuntungan pada isu lainnya (Holsti, 1967).

3. Kepentingan Jangka Panjang (*Long-Range Interests*)

Merupakan aspirasi visioner suatu negara untuk turut serta membentuk tatanan dunia di masa depan agar selaras dengan prinsip dan ideologi yang diyakininya. Kepentingan ini bersifat jangka panjang, abstrak, dan seringkali menjadi proyek lintas generasi. Tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan segera, melainkan untuk mengubah struktur dan norma sistem internasional secara perlahan. Contohnya adalah visi Amerika Serikat pada masa Perang Dingin untuk membendung penyebaran komunisme, atau cita-cita negara-negara berkembang untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil. Upaya untuk mempromosikan demokrasi atau memperjuangkan pelucutan senjata global juga termasuk dalam kategori ini. Pencapaiannya sangat sulit dan membutuhkan sumber daya serta konsistensi kebijakan selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun (Holsti, 1967).

Kepentingan Tiongkok di Afghanistan dapat dipahami melalui tiga pilar utama: keamanan, ekonomi, dan pendekatan diplomasi.

1. Kepentingan Keamanan

Fokus utama Tiongkok adalah menjaga keamanan dalam negerinya, terutama di Provinsi Xinjiang yang berdekatan dengan Afghanistan. Tiongkok khawatir bahwa ketidakstabilan di Afghanistan dapat memicu gerakan separatis dan penyebaran ideologi ekstremis di kalangan kelompok Muslim Uighur di Xinjiang. Untuk mencegah meluasnya dampak konflik, Tiongkok memanfaatkan organisasi regional seperti Shanghai Cooperation Organization (SCO) untuk mendorong stabilitas di kawasan tersebut.

2. Kepentingan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama kebijakan Tiongkok di Afghanistan. Negara ini memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas, dan mineral lainnya yang menjadi daya tarik besar bagi investasi Tiongkok. Sebagai contoh, perusahaan Tiongkok telah menanamkan investasi signifikan, salah satunya di tambang tembaga Aynak senilai 3,5 miliar USD. Perusahaan milik negara Tiongkok menjadi ujung tombak dalam investasi ini, dan mereka tetap beroperasi sambil mencari cara untuk mengamankan asetnya di tengah situasi yang tidak stabil.

3. Pendekatan Politik dan Diplomati

Pendekatan Tiongkok di Afghanistan sangat pragmatis. Berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok tidak memaksakan sistem politik tertentu dan tidak mempersoalkan bentuk pemerintahan yang ada di Afghanistan. Tiongkok juga tidak memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh pasukan asing. Sebaliknya, mereka memilih jalur diplomasi, membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Taliban, untuk melindungi kepentingan ekonominya. Selain itu, Tiongkok juga memposisikan diri sebagai fasilitator dalam proses perdamaian di Afghanistan.

Resolusi Konflik

Dalam menganalisis upaya mediasi Tiongkok dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan tahun 2016-2021, penulis juga menggunakan teori resolusi konflik. Dalam pandangan Nicholson *"conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable"* (Nicholson, 1991). Menurut pandangan yang disampaikan oleh Nicholson tersebut, resolusi konflik adalah suatu cara untuk menciptakan sebuah proses penyelesaian terhadap berbagai konsekuensi yang timbul akibat dari konflik tersebut. Menurut Johan Galtung, resolusi konflik melibatkan proses resolusi konflik yang bertujuan mewujudkan perdamaian jangka panjang. Johan Galtung juga mengemukakan tahapan dalam proses resolusi konflik yaitu, *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*.

Adapun penjelasan tentang tahapan-tahapan tersebut, terdapat pada penelitian (Izzuddin et al., 2022), sebagai berikut:

1. *Peacemaking*, yakni mewujudkan perdamaian dengan upaya negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Metode *peacemaking* dapat ditempuh dengan cara antara lain; *coercive* yakni, menetapkan kebijakan intervensi sebagai upaya kendali terhadap konflik yang menyebabkan pemaksaan secara fisik; litigasi, yakni resolusi konflik dengan mengutamakan jalur hukum; dan non-litigasi, yakni penyelesaian konflik lewat lembaga non peradilan atau melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase.
2. *Peacekeeping* merupakan tahapan menjaga keamanan untuk menghindari konflik secara terbuka atau menghindari terjadinya konflik secara kekerasan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
3. *Peacebuilding* adalah tahapan membangun kembali komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik agar kondisi kembali pada keadaan destruktif. Pada proses *peacebuilding*, akan terbentuk landasan baru yang orientasinya bersifat jangka panjang.

Penelitian (Anggrein et al., 2024) memaparkan tahapan *peacemaking* dalam mewujudkan perdamaian antara Taliban dan Afghanistan. Resolusi konflik antara Taliban dan Afghanistan dilakukan melalui tahapan *peacemaking*, yaitu pengadaan rekonsiliasi sikap politik dan strategi melalui pertemuan antar pimpinan pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Proses resolusi konflik tersebut diupayakan oleh United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) yang didirikan oleh PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, UNAMA berperan sebagai pihak ketiga dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan negara, terutama keamanan warga sipil di Afghanistan.

<satu spasi>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Mediasi Tiongkok Dalam Penyelesaian Konflik Internal Afghanistan Tahun 2016-2021

Hubungan Tiongkok dan Afghanistan telah terjalin selama berabad-abad, berpusat pada posisi Afghanistan sebagai salah satu koridor vital di Jalur Sutra kuno. Rute perdagangan ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang berharga seperti sutra, teh, dan porselen dari Tiongkok, tetapi juga berfungsi sebagai saluran dua arah bagi ide, teknologi, dan budaya. Warisan konektivitas ini dihidupkan kembali oleh Tiongkok dalam bentuk modern melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative* - BRI) yang ambisius, diluncurkan pada 2013. Dalam kerangka BRI, Afghanistan dipandang memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai "jembatan darat" yang dapat menghubungkan Tiongkok dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Potensi perluasan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) ke Afghanistan dapat mengintegrasikan negara tersebut ke dalam jaringan infrastruktur dan perdagangan regional yang lebih luas, memberikan akses ke pasar global, dan pada saat yang sama memberikan Tiongkok rute alternatif yang lebih cepat ke pelabuhan di Samudra Hindia.

Peran Tiongkok dalam proses resolusi konflik di Afghanistan telah berkembang secara signifikan, seiring dengan meningkatnya pengaruh dan kepentingannya di kawasan tersebut. Berbeda dengan kekuatan global lainnya yang cenderung melakukan intervensi militer, Tiongkok secara konsisten memilih jalur diplomasi dan mediasi sebagai pendekatan utamanya. Strategi ini memungkinkan Tiongkok untuk memajukan kepentingannya tanpa harus terjebak dalam konflik yang mahal dan berlarut-larut. Pendekatan ini selaras dengan konsep resolusi konflik yang bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara damai melalui negosiasi dan dialog, bukan melalui pemaksaan kehendak.

Upaya Tiongkok dapat dipahami melalui beberapa tahapan resolusi konflik. Pertama, pada tahap *peacemaking* (penciptaan perdamaian), Tiongkok aktif memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Upaya mediasi ini bukanlah fenomena baru; jejaknya sudah terlihat pada tahun 1998 ketika Tiongkok berhasil melakukan negosiasi langsung dengan rezim Taliban pertama untuk mendapatkan jaminan keamanan. Selama periode konflik pasca-2001, Beijing secara cermat terus memantau situasi dan secara diam-

diam menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan perwakilan Taliban, bahkan ketika mereka sedang berperang dengan pasukan internasional. Salah satu momen penting adalah ketika Tiongkok menjadi tuan rumah bagi delegasi Taliban di Tianjin pada Juli 2021, hanya beberapa minggu sebelum jatuhnya Kabul. Pertemuan ini secara efektif memberikan legitimasi diplomatik kepada Taliban dan mengirimkan sinyal jelas bahwa Tiongkok siap bekerja sama dengan siapapun yang menguasai Afghanistan, asalkan kepentingan keamanannya dihormati. Setelah kembalinya Taliban, peran Tiongkok dalam *peacemaking* menjadi semakin menonjol. Tiongkok secara aktif mendorong Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak-hak perempuan, dan yang terpenting, secara tegas memutuskan hubungan dan memerangi semua bentuk kelompok teroris, terutama ETIM, kontribusi Tiongkok juga dapat dilihat dalam kerangka *peacebuilding* (pembangunan perdamaian), yang berfokus pada penanganan akar penyebab konflik dan pembangunan fondasi perdamaian jangka panjang. Tiongkok meyakini bahwa stabilitas politik tidak dapat tercapai tanpa adanya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, komitmen Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur, pertambangan, dan energi merupakan bagian integral dari strategi *peacebuilding*. Dengan menciptakan lapangan kerja, membangun kembali infrastruktur dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Tiongkok berharap dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakpuasan sosial yang sering menjadi pemicu konflik. Ini adalah upaya untuk membangun kembali struktur sosial dan ekonomi Afghanistan yang telah hancur akibat perang selama puluhan tahun. Selain janji investasi, Tiongkok juga telah memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan, termasuk makanan dan pasokan medis, untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan pasca-2021. Bantuan ini berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan niat baik, yang merupakan elemen penting dalam proses *peacebuilding*.

Selain diplomasi bilateral, Tiongkok juga secara efektif menggunakan platform multilateral untuk mendukung perdamaian di Afghanistan. Tiongkok menjadi motor penggerak di balik mekanisme "Pertemuan Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara

Tetangga Afghanistan", yang beranggotakan Tiongkok, Pakistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Forum ini menjadi platform krusial bagi negara-negara yang paling terkena dampak langsung dari ketidakstabilan di Afghanistan untuk menyamakan persepsi, mengoordinasikan kebijakan, dan menyusun langkah-langkah bersama. Melalui forum ini, Tiongkok berusaha membangun konsensus regional mengenai cara terbaik untuk berinteraksi dengan pemerintahan Taliban dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen internasionalnya. Upaya-upaya ini menunjukkan strategi komprehensif Tiongkok yang lebih memilih untuk bertindak sebagai fasilitator perdamaian, di mana stabilitas di Afghanistan dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan keamanan Tiongkok sendiri.

Berikut adalah linimasa upaya mediasi yang melibatkan Tiongkok terhadap Afghanistan:

1. Pembentukan SCO-Afghanistan Contact Group (November 2005)

Pada bulan November 2005, Tiongkok mendukung secara aktif pembentukan *SCO-Afghanistan Contact Group* di bawah naungan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Kelompok ini dibentuk sebagai saluran komunikasi dan koordinasi antara negara-negara anggota SCO dengan pemerintah Afghanistan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama dalam menangani tantangan bersama seperti terorisme lintas batas, ekstremisme agama, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya.

Pembentukan kelompok ini menunjukkan langkah awal SCO dalam menjadikan isu Afghanistan sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan kawasan. Mengingat posisi geografis Afghanistan yang strategis, keberlanjutan stabilitas negara ini menjadi kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tengah dan sekitarnya, termasuk Tiongkok. Dalam forum ini, Tiongkok mendorong pendekatan non-militer, berfokus pada penguatan kapasitas negara, pembangunan ekonomi, dan keterlibatan diplomatik.

2. Konferensi Spesial di Moskow di Bawah Naungan SCO (27 Maret 2009)

Pada 27 Maret 2009, sebuah konferensi penting bertajuk *Special Conference on Afghanistan* diadakan di Moskow di bawah payung SCO. Konferensi ini merupakan salah satu langkah besar yang melibatkan berbagai aktor internasional untuk membahas masa depan Afghanistan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, hadir dan menyampaikan pidato yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional dalam menjamin masa depan damai dan stabil bagi Afghanistan. Tiongkok, sebagai negara anggota SCO, turut serta dalam konferensi tersebut. Kehadiran pejabat tinggi Tiongkok dalam forum ini mempertegas posisinya sebagai pihak yang berkomitmen mendukung solusi damai di Afghanistan. Selain memperkuat legitimasi SCO sebagai platform diplomatik, forum ini juga menjadi ajang untuk menyinkronkan strategi penanggulangan ekstremisme dan menegosiasikan bentuk dukungan internasional yang lebih komprehensif terhadap rekonstruksi Afghanistan.

3. Status Pengamat Afghanistan di SCO (7 Juni 2012)

Pada 7 Juni 2012, dalam KTT SCO yang diadakan di Beijing, Afghanistan secara resmi diberikan status sebagai negara pengamat. Status ini membuka peluang lebih besar bagi Afghanistan untuk terlibat dalam diskusi strategis, pertukaran informasi, serta kerja sama praktis dengan negara-negara anggota SCO, terutama Tiongkok dan Rusia.

Dengan menjadi negara pengamat, Afghanistan dapat secara lebih aktif mengakses berbagai inisiatif pembangunan regional yang difasilitasi oleh SCO. Bagi Tiongkok, keanggotaan Afghanistan sebagai pengamat merupakan bagian dari strategi membina stabilitas jangka panjang di wilayah perbatasannya, terutama mengingat kekhawatiran Beijing terhadap kemungkinan infiltrasi ideologi radikal ke wilayah Xinjiang melalui rute Afghanistan.

4. Reaktivasi SCO-Afghanistan Contact Group (2017)

Setelah sempat tidak aktif selama hampir delapan tahun, *SCO-Afghanistan Contact Group* diaktifkan kembali pada tahun 2017. Langkah ini merupakan respons atas

meningkatnya instabilitas di Afghanistan serta kebutuhan akan pendekatan multilateral yang lebih solid.

Pertemuan pertama pasca-reaktivasi berlangsung pada 11 Oktober 2017 di Moskow. Dalam pertemuan ini, dibahas strategi kerja sama konkret antara SCO dan Afghanistan, khususnya dalam hal keamanan perbatasan, pertukaran intelijen, dan pembangunan infrastruktur.

Pertemuan kedua diadakan pada 28 Mei 2018 di Beijing. Tiongkok sebagai tuan rumah menekankan pentingnya stabilitas Afghanistan bagi kawasan dan mendorong percepatan kerja sama dalam bidang ekonomi serta pelatihan kapasitas sipil.

Pertemuan ketiga berlangsung pada April 2019 dan berfokus pada dukungan terhadap proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan. Negara-negara anggota SCO menyatakan kesiapan untuk mendukung proses perdamaian inklusif yang dipimpin oleh Afghanistan itu sendiri (Afghan-led and Afghan-owned).

Reaktivasi ini menjadi bukti konkret bahwa Tiongkok dan negara-negara SCO lainnya melihat Afghanistan sebagai bagian penting dari arsitektur keamanan dan pembangunan kawasan.

5. Putaran Pertama *Trilateral Practical Cooperation Dialogue* (7 Juni 2024)

Sebuah langkah maju dalam kerja sama regional dilakukan pada 7 Juni 2024, ketika putaran pertama *Trilateral Practical Cooperation Dialogue* antara Tiongkok, Afghanistan, dan Pakistan digelar. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh situs resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Dialog ini bertujuan membahas kerja sama praktis dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur lintas batas, penguatan kapasitas keamanan, dan peningkatan konektivitas ekonomi. Format trilateral ini penting karena mencerminkan komitmen tiga negara dalam membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan bilateral yang sering terjadi antara Afghanistan dan Pakistan.

Kepentingan nasional Tiongkok dalam perdamaian antara Afghanistan dan Taliban sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini, Tiongkok berupaya untuk mengamankan stabilitas di Afghanistan, yang dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan strategisnya di kawasan tersebut.

Tiongkok mengambil hubungan kekuasaan melalui metode kerja sama. Investasi Tiongkok di Afghanistan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengamankan akses ke sumber daya alam yang penting, meningkatkan pengaruh geopolitiknya di Asia Tengah, dan mengurangi ketergantungannya pada jalur perdagangan laut yang rentan. Konektivitas regional yang ditingkatkan melalui BRI juga merupakan tujuan strategis utama.

- Sektor Ekonomi

1. Pertambangan

Afghanistan merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam paling signifikan di Asia Tengah. Meskipun selama bertahun-tahun terkendala konflik dan ketidakstabilan politik, bagi Tiongkok, keterlibatan di sektor ini bukan hanya soal akuisisi komoditas strategis, tetapi juga bagian dari kalkulasi geopolitik dan geoekonomi jangka panjang (Clarke, 2016). Sumber daya mineral Afghanistan menjadi penopang penting dalam mendukung industrialisasi tinggi Tiongkok, terutama untuk sektor teknologi, energi terbarukan, dan pertahanan nasional (Jones & Zeng, 2019).

2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan fondasi utama dalam transformasi hubungan ekonomi Tiongkok dengan Afghanistan, terutama dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) yang berambisi menciptakan konektivitas Eurasia baru yang dipimpin oleh Tiongkok. Strategi ini bukan sekadar investasi pada proyek-proyek fisik seperti jalan, rel, dan jembatan, tetapi juga mencerminkan arsitektur sistem logistik terintegrasi yang menyatukan dimensi geopolitik, ekonomi, dan teknologi. Afghanistan, sebagai negara yang terkurung daratan dan kaya akan sumber daya, menjadi simpul yang sangat penting

dalam jalur perdagangan alternatif yang menghindari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan—jalur yang selama ini dianggap rawan intervensi Barat (Clarke, 2016).

- Sektor Keamanan

Kepentingan keamanan Tiongkok terkait erat dengan stabilitas di Afghanistan. Tiongkok khawatir bahwa ketidakstabilan di Afghanistan dapat memicu penyebaran ekstremisme dan terorisme ke wilayah Xinjiang, di mana terdapat populasi Uighur yang berjuang untuk otonomi. Dalam konteks ini, Tiongkok berupaya untuk mendorong Taliban agar menahan kelompok-kelompok ekstremis yang beroperasi di Afghanistan (Zhang, 2022). Tiongkok percaya bahwa pemerintahan Taliban yang stabil dapat mengurangi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

- Sektor Politik

Periode 2016 hingga 2021 menandai fase penting dalam konstelasi hubungan politik antara Tiongkok dan Afghanistan. Dalam rentang waktu ini, Tiongkok memainkan peran yang semakin signifikan dalam upaya rekonsiliasi Afghanistan, khususnya terkait proses perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban. Di tengah ketidakpastian pasca-penarikan bertahap pasukan Amerika Serikat dan meningkatnya aktivitas diplomasi regional, Tiongkok secara aktif mengkalibrasi strategi politiknya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Afghanistan—khususnya terkait stabilitas kawasan, penanggulangan ekstremisme lintas batas, serta penguatan posisi regional dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proses perdamaian di Afghanistan mencerminkan kombinasi antara kepentingan strategis dan komitmen untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Tiongkok tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, seperti akses ke sumber daya dan pengembangan infrastruktur, tetapi juga berupaya mengatasi tantangan keamanan yang dapat muncul akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Selain itu, penting untuk melibatkan perspektif lokal

dalam penelitian, dengan melakukan wawancara atau survei terhadap masyarakat Afghanistan untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai intervensi asing dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, penting juga untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mendukung proses perdamaian, serta bagaimana kerjasama multilateral dapat meningkatkan efektivitas upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrein, F., Pahlevi, F. S., & Marsingga, P. (2024). Upaya Peacemaking United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) Dalam Manajemen Konflik Taliban dan Afghanistan. *Politics and Humanism*, 3(1), 38–44.
- Anugerah, B., & Purba, J. (2021). Kondisi Politik Dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(3), 13–34.
- Argenti, G. (2019). Taliban Dan Afganistan. Banten Tribun.
<https://www.bantentribun.com/bicara/pr-03943672/taliban-dan-afganistan>
- Brown, E. M. (1996). *The International Dimention of Internal Conflict: CSIA Studies in International Security*. MIT Press.
- Anggrein, F., Pahlevi, F. S., & Marsingga, P. (2024). Upaya Peacemaking United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) Dalam Manajemen Konflik Taliban dan Afghanistan. *Politics and Humanism*, 3(1), 38–44.
- Argenti, G. (2019). Taliban Dan Afganistan. Banten Tribun.
<https://www.bantentribun.com/bicara/pr-03943672/taliban-dan-afganistan>
- Brown, E. M. (1996). *The International Dimention of Internal Conflict: CSIA Studies in International Security*. MIT Press.
- Chene, H. (2014). *China in Afghanistan*. Institute of Peace and Conflict Studies.
- Chiu, J., & Ferrie, J. (2016). Why is China getting involved in Afghan peace talks? *The New Humanitarian*. <https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2016/07/04/why-china-getting-involved-afghan-peace-talks>
- Desk, W. (2016). First meeting of Quadrilateral Coordination Group held in Islamabad. *ARY NEWS*. <https://arynews.tv/first-meeting-of-quadrilateral-coordination-group-held-in-islamabad/>
- Hadibroto, I., Alam, S., Suryaputra, E. K., & Widjanarko, E. (2002). *Di Balik Perseteruan AS vs TALIBAN: Perang Afghanistan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasrat, W., & Nazimi. (2016). The Taliban and China's quest for Afghan copper. *DW*.
<https://www.dw.com/en/the-taliban-and-chinas-quest-for-afghan-copper/a-36607748>
- Izzuddin, A., Indrakorniawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2), 1–19.

- Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar.
- Jakobsen, J. (2013). Neorealism in International Relations–Kenneth Waltz. *Popular Social Science*, 6.
- Katzman, K. (2010). Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy.
- Khalil, A. B. (2017). The Rise of Taliban Diplomacy. *The Diplomat*, Yayin, 3.
- Maley, W. (1999). Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan. Pustaka Al-Kautsar.
- Mas’oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. LP3ES & Pusat Antar Universitas-Universitas Gadjah Mada.
- Miall, H., Romsbotham, O., & Woodhouse, T. (1999). Contemporary Conflict Resolution. Polity Press.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2020). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (4 ed.). SAGE.
- Ng, T. P. (2010). China’s Role in Shaping the Future of Afghanistan. *Carnegie Endowment Policy Outlook*, 1–13.
- Nicholson. (1991). Negotiation, Agreement and Conflict Resolution: The Role of Rational Approaches and Their Criticism. Sage Publications.
- Pambudi, A. (2022). Geografi Negara Afghanistan. *Geografi Regional Dunia*.
<https://www.geografi.org/2022/12/geografi-negara-afghanistan.html>
- Piven, B. (2015). Chinese Company and Taliban Battle Over Afghanistan’s Underground Riches. *Al Jazeera America*, 11.
- Raiszadal, S. (2015). SCO’s Effective Role for Afghanistan Stability. *The Kabul Times*.
- Small, A. (2013). Why is China Talking to the Taliban? *Foreign Policy*, 21(2).
- Sudira, I. N. (2017). Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156–171.
- Suhardono, W. (2015). KONFLIK DAN RESOLUSI. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 2(1), 1–16.
- Syarifuddin, H. (2016). Islam Modern di Afghanistan. *Jurnal Istiqra’*, 4(1), 60–66.
- Tiezzi, S. (2015). China Hosted Afghan Taliban for Talks: Report. *The Diplomat*, 7.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Zhang, Y. (2018). "China's Belt and Road Initiative: A New Model for International Development?" *Journal of International Affairs*, 71(1), 1-15.
- Kuo, M. (2020). "The China-Pakistan Economic Corridor: A New Silk Road?" *Asian Survey*, 60(3), 487-510.
- International Crisis Group. (2021). "Afghanistan: The Future of the Belt and Road Initiative." Retrieved from International Crisis Group.
- Rahimi, A. (2019). "The Role of China in Afghanistan's Economic Development." *Central Asian Affairs*, 6(2), 123-145.
- Ng, T. P. (2020). China’s Role in Shaping the Future of Afghanistan.
- Yan, W. (2018). The Cooperation Between China and Afghanistan Under the “Belt and Road Initiative”.

- Safi, M., & Alizada, B. (2020). Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative: Review, Analysis and Prospects.
- Sharan, T., & Watkins, A. (2021). Afghanistan Beyond 2021: Inroads for China's Regional Ambitions or Security Spillover?.